

**ETIKA GLOBAL : RELEVANSINYA ATAS
KONFLIK SOSIAL KEAGAMAAN
DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Theologi Islam (S.Th.I)**

**Oleh :
Lathifatul Izzah
NIM : 96522284**

**JURUSAN PERBANDINGAN AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2002**

ABSTRAK

Ternyata globalisasi memasuki wilayah-wilayah yang sangat luas, tidak hanya dunia fisik, akan tetapi masuk dalam dunia non fisik, seperti etika. Hal ini paling tidak tersirat dalam Deklarasi etika Global, yang bertujuan untuk membangun perdamaian diantara agama-agama dunia dan untuk mengobati dunia yang sedang mengalami krisis makna, nilai, dan moral. Akan tetapi untuk menjadi sebuah konsensus yang bisa mengikat setiap individu atau publik, deklarasi etika global melalui proses yang panjang dan melibatkan semua kalangan baik yang beragama ataupun tidak beragama, dan tidak ada satupun agama atau Negara yang mendominasinya, baik dalam proses pembentukan atau proses ke depannya.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library Reseach), di mana secara maksimal memanfaatkan bahan-bahan pustaka, terutama karya-karya yang menyangkut tentang etika global dan literature-literatur yang relevan. Dalam pengolahan datanya menggunakan metode deskriptif-analitis. Penelitian ini akan menjawab tentang etika global apakah relevan diaplikasikan di Indonesia yang berhadapan dengan problem konflik social keagamaannya dan juga bagaimana memaknai etika global tersebut ketika dihadapkan pada kondisi konflik social keagamaan di Indonesia.

Penelitian ini menyimpulkan : Etika global sangatlah relevan untuk diaplikasikan di Indonesia, apalagi kalau dihadapkan pada konflik social keagamaannya, karena nilai-nilai dan budaya-budaya yang ditawarkan etika global itu tidak jauh beda dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, seperti tuntutan fundamental, yaitu menuntut manusia religious or non religious harus bersikap memanusiakan manusia, memberikan arahan pasti untuk membangun perdamaian antar suku bangsa, selain itu etika global juga mengharapkan adanya suatu transformasi kesadaran, nilai ini yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Etika global akan dimaknai sebagai kode etik yang bersifat universal dan tidak bersifat langsung dalam proses menuju rekonsiliasi konflik social keagamaan di Indonesia. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mensintesis antara nilai-nilai yang ditawarkan etika global dengan upaya-upaya atau solusi yang ditawarkan oleh masyarakat, upaya-upaya penghentian, rekonsiliasi, dan rehabilitasi harus terus dilakukan secara stimulant dengan tidak mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian tanpa kekerasan, dan keadilan dan harus didukung oleh lembaga-lembaga pelancar proses perdamaian dan lembaga komisi kebenaran.

Dr. Jam'annuri, MA
Ahmad Muttaqin, Sag.

Dosen Fakultas Ushuluddin
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal. : Naskah skripsi
Sdri. Lathifatul Izzah
Lamp. : 6 (Enam) Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, setelah membaca, meneliti, mendiskusikan, serta memberikan bimbingan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa naskah Skripsi saudara :

Nama : Lathifatul Izzah
NIM : 96522284
Jurusan : Perbandingan Agama
Judul Skripsi : Etika Global: Solusi Alternatif atas Konflik Sosial Kegamaan di Indonesia

Telah memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana theologi Islam (S.Th.I) dalam Ilmu Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu, kami menyetujui skripsi mahasiswa yang bersangkutan untuk segera dipertanggungjawabkan dalam munaqasyah.

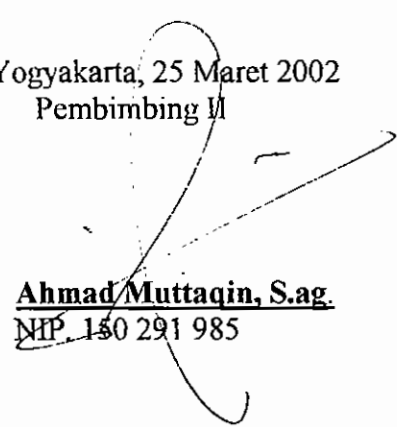
Demikian harap menjadi maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. Jam'annuri, MA.
NIP. 150 182 860

Yogyakarta, 25 Maret 2002
Pembimbing II


Ahmad Muttaqin, S.ag.
NIP. 150 291 985



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SHULUDDIN

Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512156 Yogyakarta

PENGESAHAN

Nomor : IN/I/DU/PP.00.9/507/2002

Skripsi dengan judul : Etika Global : Relevansinya atas Konflik Sosial
Keagamaan di Indonesia

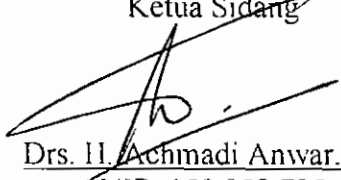
Diajukan oleh :

1. Nama : Lathifatul Izzah
2. NIM : 96522284
3. Program Sarjana Strata I Jurusan : PA

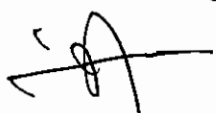
Telah dimunaqosyahkan pada hari: Senin, tanggal : 08 April 2002 dengan nilai:
75 atau B dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Theologi Islam dalam Ilmu : Ushuluddin

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH


Ketua Sidang


Drs. H. Achmadi Anwar. MM
NIP. 150 058 705

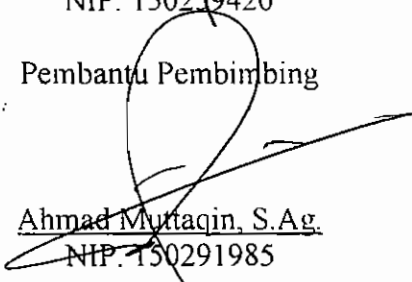
Sekretaris Sidang


Drs. Indal Abror. M.Ag.
NIP. 150259420

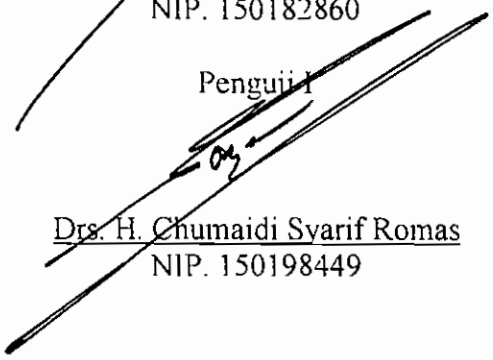
Pembimbing/merangkap Penguji


Dr. Djam'annuri, MA
NIP. 150182860

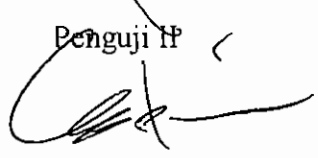
Pembantu Pembimbing


Ahmad Muttaqin, S.Ag.
NIP. 150291985

Penguji I

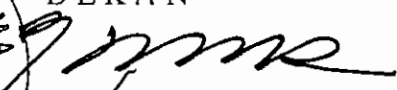

Drs. H. Chumaidi Syarif Romas
NIP. 150198449

Penguji II


Ustadi Hamzah, S.Ag.
NIP. 150298987



Yogyakarta, 08 April 2002
DEKAN


Dr. Djam'annuri, MA.
NIP. 150182860

MOTTO

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ قَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (الحجرات: ٩).

*"Dan jika ada dua orang dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil". (Q.S. Al-Hujurat (49): 9)**

*We commit ourselves to a culture of non-violence, respect, justice, and peace. We shall not oppress, injure, torture, or kill other human beings, for saking violence as a means of settling differences.**

"Kami mengikatkan diri kepada budaya tanpa kekerasan, penghormatan, keadilan dan perdamaian. Kami tidak akan menindas, melukai, menganiaya, atau membunuh orang lain, meninggalkan kekerasan sebagai cara untuk mengatasi perbedaan".

*Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), hlm. 846.

*Tim editorial Dewan-Dewan Parlemen Agama-Agama Dunia di Chicago berdasarkan deklarasi yang disusun di Tubingen, *A Global Ethic Rhe Declaration of the Parliament of the World's Religions*, (New York: Continuum, 1993), h. 15.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan buat:

Bapak dan Ibu, Kakak dan Adik-adikku, Keponakanku Pertama (Ainul Fithri), serta Teman-teman Kampus dan Asramaku Tercinta.

manusia, namun agaknya agama dipaksa berada pada posisi bertahan atau defensif (bukan melegitimasi). Adapun tawaran etika global dalam menghadapi krisis kemanusiaan di Indonesia yang berakibat pada konflik sosial keagamaan dan akhir-akhir ini berkembang menjadi konflik kekerasan, adalah warga masyarakat dituntut untuk membangun dan mengubah kesadarannya (*for building and transforming of them consciousness*), ini merupakan solusi alternatif etika global yang sangat penting bagi kehidupan manusia, diantara tawaran-tawaran solusi yang lain.

Demikian yang terjadi, sehingga butuh proses dan waktu yang panjang, untuk memaknai budaya-budaya atau nilai-nilai yang ditawarkan etika global, yang sebenarnya tidak jauh beda dengan kultur dan nilai-nilai di Indonesia, entah satu, dua, sepuluh, seratus bahkan seribuh tahun lagi untuk membangun dan merubah negeri yang masih dalam masa transisi ini.

Akhirnya harapan peneliti semoga tawaran tersebut, bisa ditanamkan pada diri anak bangsa dan diaplikasikan serta dikembangkan dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara.

KATA PENGANTAR

الحمد لله جل وعلا أحمده لجميع الأيادي والآلا وأشكره شكر من عوفى من البلاء
واستغفره لى ولوالدي ولمن له حق على وللمسلمين من كل ذنب قولاً وفعلًا وأن
نبيه ورسوله ذوالمقام الأ على وصلى الله وسلم على محمد الذى اختص الله به فضا ثلا
وعلى اله واصحابه الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا بما قالوا وغيره قتالوا الدر جات العلا

Segala puji bagi Allah, dengan nikmat-Nya amal-amal shaleh menjadi sempurna. Dengan nikmat-Nya turun berbagai kebaikan dan dengan taufik-Nya berbagai tujuan bisa terwujud termasuk penyusunan skripsi ini. Dialah yang memberi petunjuk kepada kita melalui agama. Kita tidak bisa mendapat petunjuk andaikata Allah tidak memberi petunjuk.

Sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi pembawa kabar gembira dan peringatan, pelita yang menerangi, pemimpin dan imam, teladan dan kekasih umat, Muhammad SAW., serta kerabat, shahabat dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan cara yang baik hingga hari kiamat.

Dengan diiringi rasa sukur dan terima kasih yang sangat dalam, penyusun sadar tanpa keterlibatan, bantuan dan motivasi pihak-pihak lain, penyusunan skripsi yang berjudul, **Etika Global : Relevansinya atas Konflik Sosial Keagamaan Di Indonesia** Tidak akan terselesaikan. Karena itu penyusun menyatakan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Djam'annuri, MA. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin.
2. Bapak Dr. Djam'annuri, MA. dan Bapak Muttaqin, S.Ag. atas bimbingan dan arahnya.
3. Bapak Dr. Djam'annuri, MA selaku Penasehat Akademik dan segenap Dosen di lingkungan fakultas Ushuluddin.
4. Bapak/Ibu yang tak henti-hentinya memberi motivasi baik secara mental, spiritual, maupun material.

5. Teman-teman kamar, Teman-teman Asrama, Teman-Teman kelas, dan juga Teman-Teman Kampusku.

Akhirnya, saya hanya bisa memohon semoga beliau-beliau senantiasa mendapat balasan dan anugra rahma, nikmat dan hidayah Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 20 Januari 2002

Lathifatul Izzah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Metode Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II ETIKA GLOBAL	
A. Definisi Etika Global	15
B. Tujuan Etika Global	17
C. Sejarah Etika Global	19
1. Awal Mula Etika Global Terbentuk	20

2. Persiapan Naskah	24
3. Deklarasi Menuju etika Global	26
4. Garis-garis Negatif.....	32
5. Arahan Positif	35
BAB III KONFLIK SOSIAL KEAGAMAAN DI INDONESIA SEBAGAI	
REALITAS.....	47
A. Kondisi Sosial Keagamaan di Indonesia	51
B. Memahami akar konflik sosial keagamaan	55
1. Akar Konflik Sosial Keagamaan	55
2. Faktor-faktor Penyebab Konflik Sosial Keagamaan	60
BAB IV RELEVANSI ETIKA GLOBAL DI INDONESIA	
A. Berbagai Upaya Mengatasi Konflik	72
B. Kode Etik dan Proses Menuju Rekonsiliasi Konflik	77
1. Situasi Konflik Berakhir	82
2. Pendekatan Terpadu	82
3. Merancang Masa Depan	85
3. a. Penghentian Konflik Kekerasan	87
3. b. Mengakhiri Konflik ke Langkah Transisi	94
3. c. Komunitas Dialog Menuju Transformasi Konflik.....	96
4. Lembaga Penopang Transisi	102
5. Menuju Rekonsiliasi	106
C. Problematika Etika Global	109

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	111
B. Saran-Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN	I
CURICULUM VITAE	XVII

DAFTAR LAMPIRAN

- ◆ **Introduction**
- ◆ **The Principles of a Global Ethic**
- ◆ **Isi Perjanjian Poso di Malino**
- ◆ **Isi Perjanjian Maluku di Malino**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi ternyata memasuki wilayah-wilayah kehidupan semakin luas. Jika selama ini globalisasi berlangsung dalam wilayah kehidupan material ekonomi, budaya, dan politik, kini proses tersebut meliputi wilayah non material seperti etika. Hal demikian, paling tidak, tersirat dalam deklarasi yang dilampirkan Parlemen Agama-agama Dunia.

Parlemen tersebut merupakan yang kedua dan diselenggarakan untuk memperingati Parlemen Agama-agama Dunia pertama yang berlangsung di kota yang sama satu abad lalu (tahun 1893). Jika parlemen pertama melahirkan gagasan yang terkenal dengan teologi universal maka parlemen yang kedua melahirkan deklarasi yang disebut dengan etika global (*A global ethic*). Teologi universal lebih merupakan satu kerangka teoritis yang mengakui adanya pluralisme agama dan adanya titik temu pandangan agama-agama, etika global merupakan kerangka praktis berupa paradigma etika dan moral untuk diwujudkan dalam kehidupan. Asumsi dasar dari deklarasi etika global di atas adalah banyaknya agama terlibat dalam konflik politik bahkan perang berdarah,¹ akibat krisis mendasar yang dialami manusia, yaitu krisis ekonomi global, krisis

¹ Din Samsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani* (Jakarta: Logos, 2000), h. 207-208.

ekologi global, krisis politik global. Krisis global tersebut memunculkan berbagai nestapa umat manusia yang juga mengglobal seperti kemiskinan, kelaparan, pengangguran, kedzaliman, penindasan, kekerasan dan pembunuhan. Pangkal dari segala krisis adalah krisis kemanusiaan dan krisis etika. Kelangkaan wawasan etika, terutama dikalangan para penguasa yang secara sistimatis mengarah kepada kerusakan dunia yang bersifat sistimatis pula.

Oleh karena itu dalam pandangan deklarasi etika global, tidak mungkin adanya suatu tatanan dunia baru tanpa suatu etika global baru juga.² Etika global, dalam hal ini tidak dimaksudkan sebagai suatu ideologi global atau sebagai agama tunggal, tetapi etika global dimaksudkan sebagai suatu permufakatan mendasar tentang nilai-nilai mengikat, ukuran-ukuran pasti, dan sikap-sikap pribadi yang harus dimiliki setiap manusia.³ Tanpa permufakatan mendasar akan etika seperti itu, cepat atau lambat setiap komunitas manusia akan mengalami kekacauan dan setiap diri kemudian akan menderita dan menyesal.

Pemecahan problematika sosial, ekonomi, politik dan lingkungan hidup mungkin dapat dilakukan dengan proses pembangunan yang berkesinambungan lewat perencanaan ekonomi dan politik serta pemberlakuan hukum dan undang-undang, namun semuanya itu belumlah cukup tanpa perubahan orientasi batin (*inner orientation*)

² Hans Küng (ed), *Yes to a Global Ethic* (London: SCM Press, 1996), h.13.

³ Wanaratapa, "Etika Global: Sebuah Alternatif Kesatuan antar Manusia", dalam majalah *Rohani* No. 9, 1999, h. 341.

dalam sikap mental dari masyarakat. Membutuhkan reformasi sosial dan ekologi, tetapi dalam waktu yang sama mereka membutuhkan bantuan spiritual.

Dalam kaitan ini agama memiliki kemungkinan peran dan peluang yang besar dalam mewujudkan suatu tatanan dunia baru yang berwawasan etika. Semua agama sejatinya membawa paradigma etis, moral, dan spiritual. Kekuatan etis dan spiritual agama-agama dapat berfungsi baik sebagai penilaian atau penyaringan terhadap berbagai dampak negatif dan positif dari modernisasi dan globalisasi.

Proses globalisasi yang membawa proses pluralisasi atau pemajemukan bertambah majemuk. Hal ini merupakan kenyataan yang tidak dapat diingkari mungkin merupakan *sunnatullah* dalam proses pembiakan dan penyebaran umat manusia. Dalam konteks berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, di Indonesia hadir dan berkembang berbagai suku-bangsa, ras, agama dan golongan.⁴

Bila ditinjau dari sudut agama, di Indonesia hidup dan berkembang berbagai agama-agama besar dunia, **Abdurrahman Wahid** menyebut dengan istilah agama negara atau agama yang diakui negara diberi legitimasi.⁵ Hal ini termaktub dalam UUD 1945 Pasal 29 bunyinya: 1). Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, 2). Negara

⁴ Haidar Nashir, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 87.

⁵ Abdurrahman Wahid, "Kebebasan Beragama dan Hegemoni Negara", dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, (ed), *Passing Over, Melintasi Batas Agama* (Jakarta: Gramedia dan Paramadina 1990), h. 161.

menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.⁶ Dengan demikian negara tidak mau tahu agama atau kepercayaan apa yang berkembang di negeri ini, akan tetapi yang resmi diakui oleh negara Republik Indonesia adalah agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Kristen Katholik Roma, agama Hindu, dan agama Buddha.⁷

Realitas kemajemukan dan pemajemukan, pada satu sisi merupakan musik yang indah, namun di sisi lain merupakan tantangan bagi dunia keagamaan. Hal demikian disebabkan oleh karena kemajemukan itu mengandung potensi konflik. Kendati agama memiliki kekuatan mempersatu, agama juga mempunyai potensi memecah belah, ketika agama berada dalam dataran umat atau kehidupan sosial. Kesan ambivalensi agama terhadap perang dan damai merupakan akibat logis dari watak-watak agama yang sering kali mendorong pertentangan dan konflik keagamaan. Watak-watak itu antara lain watak penyebaran agama (*absolutisme*) dan watak keharusan penyebaran agama (*ekspansionisme*).⁸

Sementara itu masyarakat Indonesia tidak hanya dihadapkan pada persoalan-persoalan yang bersifat lintas SARA saja —persoalan konflik

⁶ Eka Darmaputra, *Pancasila Identitas dan Modernitas Tinjauan Etis dan Budaya* (Jakarta : BK Gunung Mulia, 1992), h. 110.

⁷ Viktor Tanja, *Pluralitas, Spiritualitas, dan Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: BK Gunung Mulia, 1994), h. 24.

⁸ Din Samsuddin, *Op.cit.*, h., 196.

yang disebabkan oleh keagamaan masyarakat (menyangkut tanggapan masyarakat terhadap agama dalam arti kata benda, yaitu agama hanya diartikan sebagai kumpulan doktrin atau perintah tuhan yang dianggap baku dan belum adanya kedewasan umat beragama dalam hidup beragama dan berbangsa) dan juga faktor-faktor kultural, yang merupakan faktor dominan pemicu konflik sosial keagamaan di Indonesia, yakni menyangkut kehidupan sosial, ekonomi, dan politik,⁹— seperti yang terjadi di Ambon Maluku, Sambas Kalimantan Barat, Situbondo Jawa Timur, Pekalongan Jawa Tengah Tasikmalaya Jawa Barat, Poso Sulawesi Selatan, dan lain-lain. Akan tetapi kemelut dan krisis makna, nilai serta moral, juga ikut serta mewarnainya, sehingga dalam suatu seminar yang diadakan di Australia pernah diungkap tentang tiga persoalan besar yang harus dihadapi Indonesia dalam memebangun negaranya, agar menjadi negara yang kokoh dan kuat, pertama *the making of a nation* (membangun suatu bangsa) adalah suatu persoalan besar, bagaimana mempersatukan berbagai etnis, kelompok agama, dan bahasa yang masing-masing mempunyai kecenderungan independen, kedua *the making of a culture* (membangun suatu kebudayaan), yang dimaksud adalah bahwa bangsa Indonesia secara masing-masing etnis telah memiliki kebudayaan dan tradisi sendiri. Sebagai bangsa untuk memperkuat dirinya ia harus mempunyai kultur baru yakni kultur keindonesiaan. Dari sekian banyak kebudayaan daerah yang begitu

⁹ *Ibid.*, h. 196

besar, terbentuk kebudayaan baru, kebudayaan Indonesia, tanpa menghilangkan kebudayaan daerah yang ada, dan problema ketiga adalah *dualism between poverty and development* (dualisme antara kemiskinan dan pembangunan), yang dimaksud adalah kenyataan tidak mudah untuk mengingkari kemiskinan, karena Indonesia memiliki begitu banyak penduduk, yang jumlahnya nomor empat sedunia. Pembangunan berusaha agar bangsa yang secara ekonomis miskin dan mempunyai kesenjangan ekonomi yang berat, menjadi bangsa modern, sejahtera dan berpendapatan menengah sampai tinggi serta merata.¹⁰ Hal ini mengisyaratkan betapa kompleks persoalan-persoalan yang dihadapi Indonesia yang sedang membangun di tengah kemajemukan (pluralistik) yang sedemikian pusparagam.¹¹

Dari prespektif deklarasi etika global problem yang dihadapi dalam proses pembangunan bangsa Indonesia dewasa ini adalah problema etika, yakni rendahnya kadar apresiasi terhadap etika agama (yang seharusnya ada berdasarkan agama), akan tetapi egoisme kemanusiaan yang selalu mewarnai kehidupannya yaitu sebuah kehidupan yang hanya berpusat pada diri manusia, *anthroposentris*, yang berakibat fatal bagi kehidupannya sendiri, dan mengenai hal tersebut banyak fakta sejarah

¹⁰ Mustoha, "Kebijakan Pemerintah dalam Membina Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia", dalam Mursyid Ali (ed), *Dinamika Kerukunan Hidup Beragama Menurut Perspektif Agama-agama Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Beragama* (Yogyakarta: Badan Penelitian Pengembangan Agama Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama, 2000), h. 145.

¹¹ Haidar Nashir, *Op. cit.*, h. 79.

yang membuktikan, salah satu diantaranya adalah pada saat rezim Orde Baru berkuasa.

Adapun agama menawarkan sebuah kehidupan yang berpusat pada tuhan (*teosentris*), yang merupakan penolakan terhadap berbagai corak egoisme kemanusiaan. Padahal segala bentuk egoisme kemanusiaan tersebut menghalangi manusia menjadi manusia sejati. Dalam kaitan ini, kebebasan dan kemerdekaan manusia seperti dinyatakan dalam hak asasinya adalah absah, selama itu tidak dipisahkan dari tanggung jawab terhadap sesama manusia dan planet bumi ini.

Berdasarkan pemikiran di atas, etika global menawarkan sebuah konsensus yang lebih bernilai humanis (manusiawi), yaitu setiap manusia harus diperlakukan secara manusiawi, komitmen pada budaya bukan kekerasan dan penghargaan pada kehidupan, komitmen pada budaya solidaritas dan keadilan ekonomi, komitmen pada budaya toleransi dan kejujuran, komitmen terhadap budaya persamaan hak dan jender, serta transformasi kesadaran.¹² Hal ini akan terjadi bila ada kesepakatan dan pengindahan tentang kode etik dalam segala segi kehidupan berbangsa dan bernegara, lebih-lebih dalam hubungan beragama dan perlu dilakukan pemahaman dan penyadaran bahwa persoalan nasional tidak mungkin bisa diselesaikan oleh setiap individu, agama, atau kelompok masyarakat tertentu secara sendiri-sendiri, akan tetapi harus merupakan

¹² Djam'annuri, "Dialog antar Agama: Kontribusinya bagi Pembangunan Moral dan Etika Bangsa", dalam majalah *Esensia* Vol. 2, No. 1, Januari 2001, h. 33.

front (perjuangan) bersama antar individu, agama atau kelompok masyarakat dan harus saling bahu-membahu (tolong-menolong) satu dengan lainnya.¹³

Untuk itu gagasan etika global yang merupakan hasil konsensus kelompok agama-agama dengan kelompok etis dunia, diharapkan mampu menjawab problema kehidupan manusia, lebih-lebih problema yang dihadapi masyarakat Indonesia, terutama dalam proses pencarian solusi alternatif terhadap konflik sosial keagamaannya, yang akhir-akhir ini berkembang menjadi konflik kekerasan. Karena dalam milenium ketiga masyarakat dihadapkan pada tantangan utama yaitu bagaimana suatu kelompok keagamaan tetap bisa menjaga identitas tanpa meremehkan dan bahkan kalau bisa, menghargai identitas keagamaan orang lain. Cara beragama semacam ini tentu merupakan perkembangan baru dalam sejarah peradaban manusia. Menghargai identitas iman orang lain, serta mempunyai keyakinan lain. Dalam konteks dunia yang baru ini perang dan kebencian atas nama agama dianggap sebagai cara hidup yang tidak berkebudayaan atau minimal dikatakan sebagai orang yang tidak tahu tata krama bermasyarakat.¹⁴

¹³ Sumartana, "Kata Pengantar", dalam, Hans Küng dan Karl-Josef Kuschel, *Etik Global*, Pen. Ahmad Murtajib (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. xxiv.

¹⁴ Sumartana, "Peran Agama dalam Pembentukan Etika Global : Perspektif Kristen", dalam Aswab Mahasin, Beril Syamwil, *Ruh Islam dalam Budaya Bangsa III*, (Jakarta: Tanpa Penerbit, 1996), h.29-30.

B. Perumusan Masalah

Membahas tentang etika global berarti tidak terlepas dari problematika kehidupan manusia, salah satu diantaranya adalah konflik sosial keagamaan. Dalam konteks Indonesia akhir-akhir ini, konflik sosial keagamaan menjadi fenomena riil dan berkembang menjadi konflik kekerasan, oleh karena itu dibutuhkan suatu kesepakatan kode etik dalam proses mencari solusi alternatif yang menyentu akar masalah.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, maka muncullah perumusan masalah penelitian ini:

1. Apakah relevan etika global diaplikasikan di Indonesia, apalagi kalau dihadapkan pada problem konflik sosial keagamaannya ?
2. Bagaimana memaknai etika global, ketika dihadapkan pada kondisi konflik sosial keagamaan di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan ini adalah :

1. Agar bisa memahami secara objektif mengenai relevansi etika global untuk diaplikasikan di Indonesia dalam menghadapi konflik sosial keagamaannya, yang akhir-akhir ini menjadi fenomena riil dan berkembang menjadi konflik kekerasan.
2. Agar memahami secara faktual dan komperhensif mengenai konstelasi pemaknaan etika global, ketika dihadapkan pada kondisi konflik sosial keagamaannya di Indonesia.

D. Metode Penelitian

Usaha manusia untuk memenuhi dorongan ingin tahu (*curiosity*) terhadap dunia sekitarnya itu yang melahirkan adanya penelitian. Usaha untuk memenuhi dorongan ingin tahu untuk mendapat jawaban atau penyelesaian terhadap masalah tersebut ditempuh dengan mengikuti metode-metode tertentu secara formil dan sistematis.¹⁵⁾ Metode adalah sebuah rumusan yang terdiri dari sejumlah langkah-langkah yang dirangkai dalam urutan-urutan tertentu dan merupakan perangkat aturan yang dapat membantu peneliti mencapai sasaran yang tepat.¹⁶⁾

Dengan demikian metodologi penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah: Secara maksimal memanfaatkan bahan-bahan pustaka, terutama karya-karya yang menyangkut tentang etika global dan literatur-literatur yang relevan dengan kajian (*Library Research*).

Setelah data diperoleh, kemudian data-data tersebut dianalisis dengan metode *diskriptif-analitis* yaitu suatu metode untuk mengumpulkan dan menyusun data, kemudian diusahakan adanya analisis dan interpretasi atau penafsiran data-data tersebut,¹⁷⁾ serta data-data tersebut dikomparasikan dengan menggunakan metode komparatif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk

¹⁵⁾ Sumanto, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan Aplikasi Metode Kuantitatif dan Statistik dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), h. 3.

¹⁶⁾ E. Sumartono, *Hermenentik Sebuah Metode Filsafat*, Cet. VII (Yogyakarta: Kanisius, 2000), h. 134.

¹⁷⁾ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penulisan Ilmiah: Dasar Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1985), h. 139.

menentukan analisis yang membawa ke persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan.¹⁸

E. Telaah Pustaka

Untuk menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian tentang etika global, maka penting untuk dikemukakan tulisan-tulisan yang membahas tentang etika global, adapun tulisan-tulisan tersebut adalah:

Hans Küng dan Karl-Josef Kuschel dalam bukunya *A Global Ethic the Declaration of the Parliament of the Religions* (1993), menerangkan bahwa perdamaian antar agama menjadi pra syarat bagi perdamaian dunia begitu juga sebaliknya. Küng dan Yosef juga berasumsi bahwa dunia dan agama-agama sudah berubah, dunia menjadi polisentris, multikultural, dan multireligius. Dalam kontek kehidupan semacam ini satu-satunya jalan adalah persaudaraan antar agama dan kerjasama dari agama-agama yang memiliki nilai-nilai etika.

Hans Küng (ed) dalam bukunya *Yes to Global Ethic* (1996), menerangkan tentang prinsip-prinsip etika global, dan sumbangan para tokoh yang komitmen terhadap etika global baik dari kalangan politik, budayawan, agamawan, seperti Yahudi, Kristen, Islam, dan para tokoh agama Timur.

Hans Küng, *Global Responsibility in Search of a New World Ethic*, dalam buku ini Küng mengupas tentang kegagalan agama dalam berbuat

¹⁸ Mariasusai Dhavamony, *Fenomenologi Agama*, Cet. VII (Yogyakarta: Kanisius, 2001), h. 39

sesuai dengan norma etika yang mereka punyai. Kung juga berusaha memotivasi agama untuk mengingat pada persoalan-persoalan kemanusiaan dan perdamaian, karena kalau seandainya hal ini diterapkan di beberapa tempat maka pemikiran ini adalah cara yang bagus dan cerdas untuk melakukan dialog.

Literatur-literatur tersebut di atas telah mengkonstelasikan dan mendiskripsikan etika global dengan detail dan konperhensif, mengenai sejarah etika global, isi deklarasi etika global, dan pemaknaan etika global di Kanada. Akan tetapi mengenai definisi etika global dan tujuan etika global masih bersifat implisit (masih tersirat), relevansi etika global di Indonesia, yang dikonsentrasikan pada problem konflik sosial keagamaannya, dan bagaimana memaknai etika global dalam menghadapi konflik sosial keagamaan di Indonesia, sepengetahuan peneliti belum ada penelitian mengenai hal-hal tersebut. Untuk itu peneliti berusaha mengarahkan pada hal tersebut dan berusaha melakukan penelitian secara detail dan konperhensif.

F. Sistematika Pembahasan

Mengenai sistematika pembahasan yang penulis susun adalah sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan, didalam bab ini meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang etika global, pada bab ini akan dikemukakan tentang pertama etika global, kedua tujuan etika global, dan ketiga sejarah etika global, dalam subbab ini akan dikupas tentang awal mula etika global terbentuk, persiapan naskah, deklarasi etika global, garis-garis negatif, dan arahan positif.

Bab ketiga membahas tentang konflik sosial keagamaan di Indonesia sebagai realitas dalam bab ini akan dikupas mengenai pertama kondisi sosial keagamaan di Indonesia, kedua memahami akar konflik sosial keagamaan, dalam sub bab ini dibahas tentang pula tentang akar konflik sosial keagamaan dan faktor-faktor penyebab konflik.

Bab keempat akan membahas relevansi etika global di Indonesia, dalam bab ini akan dikupas tentang pertama berbagai upaya mengatasi konflik dan kedua tentang kode etik dan proses menuju rekonsiliasi konflik, sub bab ini memuat tentang situasi konflik berakhir, pendekatan terpadu, merancang masa depan, dalam anak sub bab ini akan dikupas juga tentang penghentian konflik kekerasan, mengakhiri konflik kelangkah transisi, dan komunitas dialog menuju transformasi konflik. Sub bab selanjutnya lembaga penopang transisi, menuju rekonsiliasi, dan pembahasan yang ketiga adalah problematika etika global.

Bab kelima merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Etika global sangatlah relevan untuk diaplikasikan di Indonesia, apalagi kalau dihadapkan pada konflik sosial keagamaannya, karena nilai-nilai dan budaya-budaya yang ditawarkan etika global itu tidak jauh beda dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, seperti tuntutan fundamental, yaitu menuntut manusia —*religious or non religious*— harus bersikap memanusiakan manusia (setiap manusia harus diperlakukan secara manusiawi), memberikan arah-arahan pasti untuk membangun perdamaian antar suku-bangsa, yaitu komitmen pada budaya tanpa kekerasan dan penghormatan terhadap kehidupan, solidaritas dan tata ekonomi yang adil, toleransi dan kejujuran, serta persamaan dan kemitraan antara laki-laki dan perempuan, selain nilai-nilai tersebut etika global juga mengharapkan adanya suatu transformasi kesadaran, nilai ini yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Di samping itu, nilai-nilai tersebut sebenarnya sudah tertanam sejak proses terbentuknya negara Republik Indonesia, hanya saja watak kesadaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan yang seharusnya dipupuk dalam dirinya ternyata terkaburkan oleh nafsu-nafsu, kekuasaan, dan keserakahan, akibatnya kesenjangan dan ketimpangan struktur sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi, kemudian kekerasan dan pembalasan yang

diekspresikan oleh mereka yang terpinggirkan dan tereksplorasi, selanjutnya berkembang menjadi konflik sosial, dan yang sangat memprihatinkan lagi adalah agama dijadikan identitas kolektifnya.

2. Etika global akan dimaknai sebagai kode etik yang bersifat universal dan tidak bersifat langsung dalam proses menuju rekonsiliasi konflik sosial keagamaan di Indonesia. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mensintesis antara nilai-nilai yang ditawarkan etika global dengan upaya-upaya atau solusi-solusi yang ditawarkan oleh masyarakat — upaya-upaya penghentian, rekonsiliasi, dan rehabilitasi harus terus dilakukan secara simultan dengan tidak mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian tanpa kekerasan, dan keadilan (*with not disregard the human, peace without violence, and justice values*)— dan harus didukung oleh lembaga-lembaga pelancar proses perdamaian (lembaga transisi), seperti *good office* dan lembaga komisi kebenaran.

B. Saran-Saran

1. Etika global merupakan petunjuk teoritis dan praktis bagi kehidupan manusia yang beragama maupun tidak beragama, dalam menghadapi problem kehidupannya. Oleh karena itu, diharapkan pada setiap manusia, *religious* atau *non-religious*, yang beriman untuk mensosialisasikan, mengembangkan, dan mengaplikasikan dalam kehidupannya.
2. Problema kehidupan tidak hanya sebatas pada masalah konflik dan akibatnya. Akan tetapi masih banyak masalah yang lain, lebih-lebih dalam hal kemanusiaan dan lingkungan hidup. Dengan demikian diperlukan

pembahasan lebih lanjut tentang hal-hal tersebut, yang nantinya bisa mengembangkan dan mengaplikasikan bagaimana etika global dalam menghadapi problema kehidupan diatas bumi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Wahid, "Kebebasan Beragama dan Hegemoni Negara", dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, *Passing Over: Melintasi Batas Agama*, Jakarta: Gramedia dan Paramadina, 1999.
- Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap terbuka dalam Berbagai Agama*, Bandung: Mizan, 1997.
- Anas Urbaningrum, *Ranjau-ranjau Reformasi Potret Konflik Politik Pasca Kejatuhan Soeharto*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1999.
- Ahmad Sanusi, *Agama di Tengah Kemiskinan*, Ciputat: Logos, 1999.
- Arifin Assegaf, "Memahami Sumber Konflik antar Iman", dalam Sumartana, dkk., *Pluralisme, Konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Arif Budiman, "Dimensi Sosial Ekonomi dalam Konflik antar Agama di Indonesia", dalam *Dialog dan Kritik Terhadap Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Ahmad Gaus, AF., "Damailah Bumi", dalam Komaruddin Hidayat (ed), *Agama Ditengah Kemelut*, Jakarta: Mediacita, 2001.
- Agus Muladi dan Mudjahirin, *Membangun Rasa Damai di atas Bara*, Semarang: Limpad, 2000.
- Dhavamony, Mariasusai, *Fenomenologi Agama*, Cet. VII, Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Djam'annuri, "Dialog antar Agama, Kontribusinya bagi Pembangunan Moral dan Etika Bangsa", dalam Majalah *Esensia*, Vol. 2, No. 1, Januari 2001.
- Din Samsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Logos, 2000.
- Djoko Suryo, "Sosial dan Kawasan Nasionalisme Masa Lampau dan Kini", Dalam A. Munir Mulhan, dkk, *Konflik Kekerasan Tantangan Bagi Demokrasi*, Yogyakarta: Forum LSM DIY, 2001.
- Eka Darmaputra, *Pancasila dan Modernitas Tinjauan Etnis dan Budaya*, Jakarta: BK. Gunung Mulia, 1992.

- Elisa, Building, "Culturs of Peace and Comunities of Faith", dalam Robert Herr and Judy Zimmerman Herr (ed), *Transforming Violence, Lingking Local and Global Peacemaking*, Waterloo: Heralh Perss, 1999.
- Fissher, R.J. dan L Keashly, "The Potensial Complmentery of Mediaton and Consultation within a Contingency Model of Third Party Intrvention", *Jurnal of Peace Resarch*, Vol. 28. No.1, 1991.
- Genichen, D. H. W., "Perang dan Damai dalam Agama", dalam Ali Noer Zaman, (ed), *Agama untuk Manusia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Gebhardt, Guanter, "Toward a Global Ethic", dalam *Jurnal the Ecumenical Review*, No.52, 2000.
- Hendricks, William, *Bagaimana Mengelolah Konflik Praktis untuk Memejemen Konflik yang Iefektif*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Hasan Hanafi, *Agama, Kekerasan, dan Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Jendela Grafika, 2001.
- Hick, John, "Religious Pluralism", dalam Frank Whaling, *The World's Religious Traditions*, Eidenbrugh: TRT. Cark, 1984.
- Umar Hasan, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan antar Agama*, Surabaya: Bina Ilmu, 1979.
- Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, Jakarta: Kanisius, 1983.
- Haidar Nashir, *Agama dan Krisis Kemamusiaan Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- , "Agama dan Mobilisasi Politik", dalam Andito, (ed), *Atas Nama Agama Wacana dalam Dialog Bebas Konflik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Ihsan Ali Fauzi, "Ambivalensi Sebagai Peluang Agama, Kekerasan, dan Upaya Perdamaian", dalam Syfaul Arifin, (ed.), *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Komaruddin Hidayat, "Agama untuk Kemanusiaan", dalam Andito, (ed), *Atas Nama Agama Wacana Agama dalam Dialog Bebas Konflik*, Bandung: IKAPI, 1998.
- Kuschel, Karl-Josef, "The Parliamen of the World's Religions, 1893-1993", dalam Hans Küng dan Karl-Josef Kuschel, *A Global Ethic the Declaration of the World's Religions*, New York: Continnum, 1993.

- King, B. Sellie, "A Buddhist Perspective on a Global Ethic and Human Rights", dalam *Journal of Dharma*, No. 20, 1995.
- King, Ursula, "Debat Metodologi Pasca Perang Dunia II", dalam Ahmad Norman Permata, (ed.), *Metodologi Studi Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Küng, Hans and Karl-Josef Kuschel, (ed) *A Global Ethic the Declaration of the Parliament of the World's Religions*, New York: Continuum, 1993.
- , *Etik Global*, pent. Ahmad Murtajib, Yogyakarta : Sisiphus dan Pustaka Pelajar, 1999.
- Küng, Hans, "The History, Significance and Method of the Declaration Toward a Global Ethic", dalam Hans Küng and Karl-Josef Kuschel, *a Global Ethic the Declaration of the Parliament of the World's Religions*, New York: Continuum, 1993.
- , "World Peace —World Religions— World Ethic", dalam Jurnal *Concilium*, No. 3, Inggris, 1994.
- , *Global Responsibility: In Search Without a World Ethic*, New York, Crossroad, 1991.
- , *Yes to a Global Ethic*, London: SCM Perss, 1996.
- Ledcarch, John Paul, "Remember and Cheng", dalam Robert Herr and Juddy Zimmerman Herr, (ed), *Trasforming Violence, Lingking, Local, and Global Peacemaking*, Scitdeale: Herald Perss, 1988.
- Lambang Trijono, *Keluar dari Kemelut Maluku Refleksi Penalaman Praktis Bekerja untuk Perdamaian Maluku*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001.
- , "Konflik Horisontal dengan Rekonsiliasi Multitrack", dalam A. Munir Mulhan, dkk, *Kekerasan dan Konflik Tantangan bagi Demokrasi*, Yogyakarta: Forum LSM DIY, 2001.
- Munir Mulkhan, A. dkk., *Kekerasan dan Konflik Tantangan Bagi Demokrasi*, Yogyakarta: Forum LSM DIY, 2001.
- Mial, Hugh, (ed), *Resolusi Damai Konflik Kontemporer : Penyelesaian, Mencegah, Mengelolah, dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama, dan Ras*, pent. Tri Budhi Sastrio, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2000.
- Mitchell, Crstoper R., "Problem-Solving Exercise and Theories of Conflic Resoluton", dalam Denin J.D. Sondok, (ed), *Conflic Rredution, Theory and*

- Marsana Windu, "Dimensi Kekerasan: Tinjauan Teoritis dan Fenomena Kekerasan", dalam Syfaul Arifin, *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan PP IRM, 2000.
- Mustoha, "Kebijakan Pemerintah dalam Membina Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia", dalam Mursyid Ali, (ed), *Dinamika Kerukunan Hidup Beragama Menurut Perpektif Agama-agama Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Beragama*, Jakarta: Badan Penelitian Pengembangan Agama Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama, 2000.
- Muhaimin Ruslani, A., "Palagan Konflik", dalam A. Munir Mulhan, dkk., *Kekerasan dan Konflik Tantangan bagi Demokrasi*, Yogyakarta: Forum LSM DIY, 2000.
- Mohammad Songge, H.R., "Agama dan Krisis Sosial", dalam Komaruddin Hidayat, (ed), *Agama di Tengah Kemelut*, Jakarta: Mediacita, 2001.
- Nur Cholis Madjid, "Dialog Agama-Agama dalam Perspektif Universal Al- Islam", dalam Kommaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, (ed), *Passing Over: Melintasi Batas Agama*, Jakarta: Gramedia dan Paramadian, 1999.
- Nandang Sutrisna, "Dasar-Dasar Penyelesaian Sengketa", dalam A. Munir Mulhan, dkk, *Kekerasan dan Konflik Tantanag Bagi Demokrasi*, Yogyakarta: Forum LSM DIY, 2001.
- Natan Sami, *Potensi Konflik dan Integrasi antar Agama Analisa Faktor-Faktor Internal dan Eksternal serta Upaya Peningkatan Dalam Memasuki Abad 21*, Yogyakarta: Depag., 2000.
- O Dea, Thomas, F., *Sosiologi Agama*, Jakarta: CV Rajawali, 1985.
- Pillay, Geralj, *Recontruction: Healling a Nation's soul*, dalam Robert Herr and Judy Zimmer Herr, *Transforming Violence Local and Global Peacemaking*, Scottdale: Herald Perss, 1998.
- Ruslani, *Masyarakat Kitab dan Dialog antar Agama Studi atas Pemikiran Arkon*, Yogyakarta: Bentang Budaya, 2000.
- Schreiter, Robert, J., *Rekonsiliasi Membangaun Masyarakat Baru*, Semarang Nusa Indah, 2000.
- Syafa'atun Elmirzana, "Pluralisme, Konflik dan Dialog", Dalam Majalah Esensia, Vol. 2, No. 1, Januari 2001.
- Sunardi, *Keselamatan Kapitalisme Kekerasan Kesaksian atas Paradoks-paradoks*, Yogyakarta: LKIS, 1996.

-----, "Dialog: Cara Baru Beragama Sumbangan Hans Küng bagi Dialog antar Agama", dalam *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.

Sumartana, "Kata Pengantar", dalam Hans Küng dan Karel-josef Kuschel, *Etika Global*, Yogyakarta: Sishipus dan Pustaka Pelajar, 1999.

-----, "Peran Agama dalam Membentuk Etika Global: Prespektif Kristen", dalam Aswab Mahasin dan Beril Syamwil, *Ruh Islam dalam Budaya Bangsa III*, Jakarta: TP. 1996.

Sumaryono, E., *Hermeneutik sebuah Metode Filsafat*, Cet. VII., Yogyakarta: Kanisius, 2000.

Swidler, Leonard dan Hans Küng, dalam Jurnal, *Concilium*, No. 3, 1994.

Viktor Tanja, *Pluralisme Agama dan Problem Sosial Diskursus Teologi Tantangan Isu-Isu Kontemporer*, Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 1998.

-----, *Pluralitas, Spiritualitas, dan Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: BK Gunung Mulia, 1994.

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penulisan Ilmiah: Dasar Metode dan teknik*, Bandung: Tarsito, 1985.

Wanaratapa, "Etika Global: Sebuah Alternatif Kesatuan antara Manusia?", dalam majalah *Rohani*, No. 9, 1999.

Yongky Karman, "Pasca Kesepakatan Damai", *Kompas*, 17 Januari 2002.

Dialog Antar Umat Beragama, Laporan Panitia Pelaksana Dialog Antar Umat Beragama Di Yogyakarta,

-----, *Kompas*, 18 Januari 2002

-----, *Kompas*, 13 Februari 2002

-----, *Kompas*, 20 Desember 2001 atau <http://www.kjri ffm.de/Buletin Des 2001.doc>.

LAMPIRAN

Introduction *

The world is in agony. The agony is so pervasive and urgent that we are compelled to name its manifestations so that the depth of this pain may be made clear.

Peace eludes us ... the planet is being destroyed ... neighbours live in fear ... women and men are estranged from each other ... children die !

We condemn the poverty that stifles life's potential; the hunger that weakens the human body; the economic disparities that threaten so many families with ruin.

We condemn the social disarray of the nations; the disregard for justice which pushes citizens to the margin; the anarchy overtaking our communities; and the insane death of children from violence. In particular we condemn aggression and hatred in the name of religion.

But this agony need not be.

In need not be the basis for an ethic already exists. This ethic offers the possibility of a better individual and global order, and leads individuals away from despair and societies away from chaos.

We are women and men who have embraced the precepts and practices of the world's religions.

We affirm that a common set of core values is found in the teachings of the religions, and that these form the basis of a global ethic.

We affirm that this truth is already known, but yet to be lived in heart and action.

We affirm that there is an irrevocable, unconditional norm for all areas of life, for families and communities, for races, nations and religions. There already exist ancient guidelines for human behaviour which are found in the teachings of the religions of the world and which are the conditions for a sustainable world order.

We declare:

We are interdependent. Each of us depends on the well-being of the whole, and so we have respect for the community of living beings, for people, animals, and plants, and for the preservations of Earth, the air, water and soil.

We take individual responsibility for all we do. All our decisions, actions, and failures to act have consequences.

We must treat others as we wish others to treat us. We make a commitment to respect life and dignity, individuality and diversity, so that every person is treated humanely, without exception. We must have patience and acceptance. We must be able to forgive, learning from the past but never allowing ourselves to be enslaved by memories of hate. Opening our hearts to one another, we must sink our narrow differences for the cause of world community, practising a culture of solidarity and relatedness.

We consider humankind our family. We must strive to be kind and generous. We must not live for ourselves alone, but should also serve other, never forgetting the children, the aged, the poor, the suffering, the disabled, the refugees, and the lonely. No person should ever be considered or treated as a second-class citizen, or be exploited in any way whatsoever. There should be equal partnership between men and women. We must not commit any kind of sexual immorality. We must put behind us all forms of domination or abuse.

We commit ourselves to a culture of non-violence, respect, justice and peace. We shall not oppress, injure, torture, or kill other human beings, forsaking violence as a means of settling differences.

We must strive for a just social and economic order, in which everyone has an equal chance to reach full potential as a human being. We must speak and act truthfully and with compassion, dealing fairly with all, and avoiding prejudice and hatred. We must not steal. We must move beyond the dominance of greed for power, prestige, money and consumption to make a just and peaceful world. Earth cannot be changed for the better unless the consciousness of individuals is changed first. We pledge to increase our awareness by disciplining our minds, by meditation, by prayer, or by positive thinking. Without risk and a readiness to sacrifice there can be no fundamental change in our situation. Therefore we commit ourselves to this global ethic, to understanding one another, and to socially-beneficial, peace-fostering, and nature-friendly ways of life.

We invite all people, whether religious or not, to do the same.

- The text entitled 'Introduction' was produced by an Editorial Committee of the 'Council' of the Parliament of the World's Religions in Chicago on the basis of the Declaration composed in Tübingen (here headed 'Principles'). It was meant to serve as a brief summary of the Declaration for publicity purposes. At the same time it was intended to be read aloud in public. So this text was read out publicly at the solemn concluding plenary on 4 September 1993 in Grant Park, Chicago; a number of passages were greeted with spontaneous applause by the audience of thousands.

The Principles of a Global Ethic

Our world is experiencing a **fundamental crisis**: a crisis in global economy, global ecology, and global politics. The lack of grand vision, the tangle of unresolved problems, political leadership with little insight or foresight, and in general too little sense for the commonweal are seen everywhere. Too many old answers to new challenges.

Hundreds of millions of human beings on our planet increasingly suffer from unemployment, poverty, hunger, and the destruction of their families. Hope for a lasting peace among nations slips away from us. There are tensions between the sexes and generations. Children die, kill, and are killed. More and more countries are shaken by corruption in politics and business. It is increasingly difficult to live together peacefully in our cities because of social, racial, and ethnic conflicts, the abuse of drugs, organized crime, and even anarchy. Even neighbours often live in fear of one another. Our planet continues to be ruthlessly plundered. A collapse of the ecosystem threatens us.

Time and again we see leaders and members of religions incite aggression, fanaticism, hate, and xenophobia – even inspire and legitimate violent and bloody conflicts. Religion often is misused for purely power-political goals, including war. We are filled with disgust.

We condemn these blights and decide that they need not be. An ethic already exist within the religion teachings of the world which can counter the goals distress. Of course this ethic provides no direct solution for all the immense problems of the world, but it does supply the moral foundation for a better individual and global order: a **vision** which can lead women and men away from despair, and society away from chaos.

We are persons who have committed ourselves to the precepts and practise of the world's religions. We confirm that there is already a consensus among the religions which can be the basis for a global ethic – a minimal **fundamental consensus** concerning binding **values**, irrevocable **standards**, and fundamental **moral attitudes**.

I. No new global order without a new global ethic

We women and men of various religions and regions of Earth therefore address all people, religious and non religious. We wish express the following convictions which we hold in common.

- We all have a **responsibility for a better global order**.
- Our involvement for the sake of human rights, freedom, justice, peace, and the preservation of Earth is absolutely necessary.
- Our different religious and culture traditions must not prevent our common involvement in opposing all forms of inhumanity and working for greater humaneness.
- The principles expressed in this global ethic can be affirmed by all persons with ethical convictions, whether religiously grounded or not.

As religious and spiritual persons we base our lives on an Ultimate Reality, and draw spiritual power and hope therefrom, in trust, in prayer or meditation, in word or silence. We have a special responsibility for the welfare of all humanity and care for the planet Earth. We do not consider ourselves better than other women and men, but we trust that the ancient wisdom of our religions can point the way for the future.

After two world wars and the end of the cold war, the collapse of fascism and nazism, the shaking to the foundations of communism and colonialism, humanity has entered a new phase of its history. Today we possess sufficient economic, cultural, and spiritual resources to introduce a better global order, but old and new **ethnic, national, social, economic, and religious tensions** threaten the peaceful building a better world. We have experienced greater technology progress than ever before, yet we see that world-wide poverty, hunger, death of children, unemployment, misery, and the destruction of nature have not diminished but rather have increased. Many peoples are threatened with economic ruin, social disarray, political marginalization, ecological catastrophe, and moral collapse.

In such a dramatic global situation humanity needs **vision of peoples living peacefully together**, of ethnic and ethical groupings and of religions sharing responsibility for the care of Earth. A vision rests on hopes, goals, ideals, standards. But all over the world these have slipped from our hands. Yet we are convinced that, despite from our hands. Yet we are convinced that, despite their frequent abuses and failures, it is the communities of faith who bear a responsibility to demonstrate that such hopes, ideals, and standards can be guarded, grounded and lived. This is especially true in the modern state. Guarantees of freedom of conscience and religion are necessary, but they do not substitute for binding values, convictions, and norms which are valid for all humans regardless of their social origin, sex, skin colour, language, or religion.

We are convinced of the fundamental unity of the human family on Earth. We recall the 1948 Universal Declaration of Human Rights of the United Nations. What it formally proclaimed on the level of rights we wish to confirm and deepen here from the perspective of an **ethic**: the full realization of the intrinsic dignity of the human person, the inalienable freedom and equality in principle of all humans, and the necessary solidarity and interdependence of all humans with each other.

On the basis of personal experiences and the burden some history of our planet we have learned.

- That a better global order cannot be created or enforced by laws, prescriptions, and conventions alone;
- That the realization of peace, justice, and the protection of earth depends on the insight and readiness of men and women to act justly;
- That action in favour of rights and freedoms presumes a consciousness of responsibility and duty, and that therefore both the minds and hearts of women and men must be addressed;

- That rights without morality cannot long endure, and that there will be no **better global order without a global ethic.**

By a **global ethic** we do not mean a global ideology or a **single unified religion** beyond all existing religions, and certainly not the domination of one religion over all others. By a global ethic we mean a **fundamental consensus on binding values, irrevocable standards, and personal attitudes.** Without such a fundamental consensus on an ethic, sooner or later every community will be threatened by chaos or dictatorship, and individuals will despair.

II. **A fundamental demand: Every human being must be treated humanely**

We all are fallible, imperfect men and women with limitations and defects. We know the reality of evil. Precisely because of this, we feel compelled for the sake of global welfare to express what the fundamental elements of a global ethic should be – for individuals as well as for communities and organisations, for states as well as for the religions themselves. We trust that our often millennia – old religious and ethical traditions provide an ethic which is convincing and practical for **all women and men of good will**, religious and non-religious.

At the same time we know that our various religious and ethical often very different bases of what is helpful and what is unhelpful for men and women, what is right and what is wrong, what is good and what is evil. We do not wish to gloss over or ignore the serious differences among the individual religions. However, they should not hinder us from proclaiming publicly **those things which we already hold in common** and which we jointly affirm, each on the basis of

We know that religions cannot solve the environmental, economic, political, and social problems of Earth. However, they can provide what obviously cannot be attained by economic plans, political programmes or legal regulations alone: **a change in the inner orientation for life.** Humankind urgently needs social and ecological reforms, but it needs **spiritual renewal** just as urgently. As religious or spiritual persons we commit ourselves to this task. The spiritual powers of the religions can offer a fundamental sense of trust, a ground of meaning, ultimate standards, and a spiritual home. Of course religions are credible only when they eliminate those conflicts which spring from the religions themselves, dismantling mutual arrogance, mistrust, prejudice, and even hostile images, and thus demonstrate respect for the traditions, holy place, feasts, and ritual of people who believe differently.

Now as before, **women and men are treated inhumanely** all over the world. They are robbed of their opportunities and their freedom, their human rights are trampled underfoot; their dignity is disregarded. But might does not make right! In the face of all humanity our religious and ethical convictions demand that **every human being must be treated humanely!**

This means that every human being without distinction of age, sex, race, skin colour, physical or mental ability, language, religion, political view, or national or social origin possesses an inalienable and untouchable dignity.

And everyone, the individual as well as the state, is therefore obliged to honour this dignity and protect it. Humans must always be the subjects of rights, must be ends, never mere means, never objects of commercialisation and industrialisation in economics, politics and media, in research institutes, and industrial corporations. No one stands 'above good and evil' -- no human being, no social class, no influential interest group, no cartel, no police apparatus, no army, and no state. On the contrary; possessed of reason and conscience, every human is obliged to behave in a genuinely human fashion, to **do good and avoid evil !**

It is the intention of this Global Ethic to clarify what this means. In it we wish to recall irrevocable, unconditional ethical norms. These should not be bonds and chains, but helps and supports for people to find and realize once again their lives directions, orientations, and meaning.

There is principle which is found and has persisted in many religious and ethical traditions of human kind for thousands of years: **What you do not wish done to yourself, do not do to others !** Or in positive terms: **What you wish done to yourself, do to others !** This should be the irrevocable, unconditional norm for all areas of life, for families and communities, for races, nations and religions.

Every form of egoism should be rejected: all selfishness, whether individual or collective, whether in the form of class thinking, racism, nationalism, or sexism. We condemn these because they prevent humans from being authentically human. Self determination and self realization are thoroughly legitimate so long as they are not separated from human self responsibility and global responsibility, that is, from responsibility for fellow humans should hold firm. From it arise **four broad, ancient guidelines** for human behaviour which are found in most of religions of the world.

III. Four irrevocable directives

1. Commitment to a culture of non-violence and respect for life

Numberless women and men of all regions and religions strive to lead lives not determined by egoism but by commitment to their fellow humans and to the world around them. Nevertheless, all over the world we find endless hatred, envy, jealousy and violence, not only between individuals but also between social and ethnic groups, between classes, races, nations, and religions. The use of violence, drug trafficking and organized crime, often equipped with new technical possibilities, has reached global proportions. Many places are still ruled by terror 'from above'; dictators oppress their own people, and institutional violence is widespread. Even in some countries where laws exists to protect individual freedoms, prisoners are tortured, men and women are mutilated, hostages are killed.

- (a) In the great ancient religious and ethical traditions of humankind we find the directive: **You shall not kill !** Or in positive terms: **Have respect for life !** Let us reflect anew on the consequences of this ancient directive: all people have a right to life, safety, and the free development of personality in so far as they free development of

personality in so far as they do not injure the rights of others. No one has the right physically or physically to torture, injure, much less kill, any other human being. And no people, no state, no race, no religion has the right to hate, to discriminate against, to 'cleansse', to exile, much less to liquidate a 'foreign' minority which is different in behaviour or holds different beliefs.

- (b) Of course, wherever there are humans there will be conflicts. Such conflicts, however, should be resolved without violence within a framework of justice. This is true for states as well as for individuals. Persons who hold political power must work within the framework of a just order and commit themselves to the most non-violent, peaceful solution possible. And they should work for this within an international order of peace which itself has need of protection and defence against perpetrators of violence. Armament is a mistaken path; disarmament is the commandment of the times.
- (c) Young people must learn at home and in school that violence may not be a means of settling differences with others. Only thus can a **culture of non-violence** be created.
- (d) A human person is infinitely precious and must be unconditionally protected. But likewise the **lives of animals and plants** which inhabit this planet with us deserve protection, preservation, and care. Limitless exploitation of the natural foundations of life, ruthless destruction of the biosphere, and militarization of the cosmos are all outrages. As human being we have a special responsibility – especially with a view to future generations – for Earth and the cosmos, for the air, water, and soil. We are **all intertwined together** in this cosmos and we are all dependent on each other. Each one of us depends on the welfare of all. Therefore the dominance of humanity over nature and the cosmos must not be encouraged. Instead we must cultivate living in harmony with nature and the cosmos.
- (e) To be authentically human in the spirit of our great religious and ethical traditions means that in public as well as in private life we must be concerned for others and ready to help. We must never be ruthless and brutal. Every people, every race, every religion must show tolerance and respect – indeed high appreciation – for every other. Minorities need protection and support, whether they be racial, ethnic, or religious.

2. **Commitment to a culture of solidarity and a just economic order**

Numberless men and women of all regions and religions strive to live their lives in solidarity with one another and to work for authentic fulfilment of their vocations. Nevertheless, all over the world we find endless hunger, deficiency, and need. Not only individuals, but especially unjust institutions and structures are responsible for these tragedies. Millions of people are without work; millions are exploited by poor wages, forced to the edges of society, with their possibilities for the future destroyed. In many lands the gap between the poor and the rich, between the powerful and the

powerless is immense. We live in a world in which totalitarian state socialism as well as unbridled capitalism have hollowed out and destroyed many ethical and spiritual values. A materialistic mentality breeds greed for unlimited profit and a grasping for endless plunder. These demands claim more and more of the community's resource without obliging the individual to contribute more. The cancerous social evil of corruption thrives in the developing countries and in the developed countries alike.

- (a) In the great ancient religious and ethical traditions of human kind we find the directive: **You shall not steal !** Or in positive terms: **Deal honestly and fairly !** Let us reflect anew on the consequences of this ancient directive: No one has the right to rob or dispossess in any way what so ever any other person or the commonweal. Further, no one has the right to use her or his possessions without concern for the needs of society and Earth.
- (b) Where extreme poverty reigns, helplessness and despair spread, and theft occurs again and again for the sake of survival. Where power and wealth are accumulated ruthlessly, feelings of envy, resentment, and deadly hatred and rebellion inevitably well up in the disadvantaged and marginalized. This leads to a vicious circle of violence and counter-violence. Let no one be deceived: There is no global peace without global justice !
- (c) Young people must learn at home and in school that property, limited though it may be, carries with it an obligation, and that its uses should at the same time serve the common good. Only thus can a **just economic order** be built up.
- (d) If the plight of the poorest billions of humans on this planet, particularly women and children, is to be improved, the world economy must be structured more justly. Individual good deeds, and assistance projects, in dispensable though they be, are insufficient. The participation of all states and the authority of international organizations are needed to build just economic institutions.

A solution which can be supported by all sides must be sought for the debt crisis the poverty of the dissolving. Second World, and even more the Third World. Of course conflicts of interest are unavoidable. In the developed countries, a distinction must be made between necessary and limitless consumption, between socially beneficial and non beneficial uses of property, between justified and unjustified uses of natural resources, and between a profit - only and socially beneficial and ecologically oriented market economy. Even the developing nations must search their national consciences.

Wherever those ruling threaten to repress those ruled, wherever institutions threaten persons, and wherever might oppresses right, we have an obligation to resist - whenever possible non - violently.

- (e) To be authentically human in the spirit of our great religious and ethical traditions means the following.

We must utilize economic and political power for **service to humanity** instead of misusing it in ruthless battles for domination. We must develop a spirit of compassion with those who suffer, with special care for the children, the aged, the poor, the disabled, the refugees, and the lonely.

We must cultivate **mutual respect** and consideration, so as to reach a reasonable balance of interests, instead of thinking only of unlimited power and unavoidable competitive struggles.

We must value **a sense of moderation and modesty** instead of an unquenchable greed for money, prestige, and consumption ! In greed humans lose their 'souls', their freedom, their composure, their inner peace, and thus that which makes them human.

3. **Commitment to a culture of tolerance and a life of truthfulness**

Numberless women and men of all regions and religions strive to lead lives of honesty and truthfulness. Nevertheless, all over the world we find endless lies and deceit, swindling and hypocrisy, ideology and demagoguery:

- Politicians and business people who use lies as a means to success;
- Mass media which spread ideological propaganda instead of accurate reporting, misinformation instead of information, cynical commercial interest instead of loyalty to the truth;
- Scientists and researchers who give themselves over to morally questionable ideological or political programmes or to economic interest groups, or who justify research violates fundamental ethical values;
- Representatives of religions who dismiss other religions as of little value and who preach fanaticism and intolerance instead of respect and understanding.

(a) In the great ancient religious and ethical traditions of human kind we find the directive: **You shall not lie !** Or in positive terms: **Speak and act truthfully !** Let us reflect anew on the consequences of this ancient directive: No woman or man, no institution, no state or church or religious community has the right to speak lies to other humans.

(b) This is especially true:

- For those who work in the **mass media**, to whom we entrust the freedom to report for the sake of truth and to whom we thus grant the office of guardian. They do not stand above morality but have the obligation to respect human dignity, human rights, and fundamental values. They are duty-bound to objective, fairness, and the preservation of human dignity. They have no right to intrude into individuals private spheres, to manipulate public opinion, or to distort reality;
- For **artists, writers, and scientists**, to whom we entrust artistic and academic freedom. They are not exempt from general ethical standards and must serve the truth;
- For the **leaders of countries, politicians, and political parties**, to whom we entrust our own freedoms. When they lie in the faces of their people, when they manipulate the truth, or when they are guilty of venality or ruthlessness in domestic or foreign affairs, they forsake their credibility and deserve to lose their offices and their voters. Conversely, public opinion should support those politicians who dare to speak the truth to the people at all times.
- Finally, for **representatives of religion**. When they stir up prejudice, hatred, and enmity towards those of different belief, or even incite or legitimate religious wars, they deserve the condemnation of humankind and the loss of their adherents.

Let no one be deceived, There is no global justice without truthfulness and humaneness !

(c) Young people must learn at home and in school to think, speak, and act **truthfully**. They have a right to information and education to be able to make the decisions that will form their lives. Without an ethical formation they will hardly be able to distinguish the important from the unimportant. In the daily flood of information, ethical standards will help them discern when opinions are portrayed as facts, interests veiled, tendencies exaggerated, and facts twisted.

(d) To be authentically human in the spirit of our great religious and ethical traditions means the following:

- We must not confuse freedom with arbitrariness or pluralism with indifference to **truth**.
- We must cultivate **truthfulness** in all our relationships instead of dishonesty, dissembling, and opportunism.
- We must **constantly seek truth** and incorruptible sincerity instead of spreading ideological or partisan half-truths.
- We must courageously **serve the truth** and we must remain **constant and trustworthy**, instead of yielding to opportunistic accommodation to life.

4. Commitment to a culture of equal rights and partnership between men and women

Numberless men and women of all regions and religions strive to live their lives in a spirit of partnership and responsible action in the areas of love, sexuality, and family. Nevertheless all over the world there are condemnable forms of patriarchy, domination of one sex over the other, exploitation of women, sexual misuse of children, and forced prostitution. Too frequently, social inequities force women and even children into prostitution as a means of survival – particularly in less developed countries.

(a) In the great ancient religious and ethical traditions of humankind we find the directive: **You shall not commit sexual immorality !** Or in positive terms: **Respect and love one another !** Let us reflect anew on the consequences of this ancient directive: No one has the right to degrade others to mere sex objects, to lead them into or hold them in sexual dependency.

(b) We condemn sexual exploitation and sexual discrimination as one of the worst forms of human degradation. We have the duty to resist wherever the domination of one sex over the other is preached – even in the name of religious conviction; wherever sexual exploitation is tolerated, wherever prostitution is fostered or children are misused. Let no one be deceived: There is no authentic humaneness without a living together in partnership !

(c) Young people must learn at home and in school that sexuality is not a negative, destructive, or exploitative force, but creative and affirmative. Sexuality as a life-affirming shaper of community can only be effective when partners accept the responsibilities of caring for one another's happiness.

(d) The relationship between women and men should be characterized not by patronizing behaviour or exploitation, but by love, partnership, and trustworthiness. Human fulfilment is not identical with sexual pleasure. Sexuality should express and reinforce a loving relationship lived by equal partners.

Some religious traditions know the ideal of a voluntary renunciation of the full use of sexuality. Voluntary renunciation also can be an expression of identity and meaningful fulfilment.

(e) The social institution of marriage, despite all its cultural and religious variety, is characterized by love, loyalty, and permanence. It aims and should guarantee security and mutual support to husband, wife, and child. It should secure the rights of all family members. All lands and

cultures should develop economic and social relationships which will enable marriage and family life worthy of human beings, especially for older people. Children have a right of access to education. Parents should not exploit children, nor children parents. Their relationships should reflect mutual respect, appreciation, and concern.

- (f) To be authentically human in the spirit of our great religious and ethical traditions means the following:

We need mutual respect, **partnership**, and understanding, instead of patriarchal domination and degradation, which are expressions of violence and engender counter-violence.

We need mutual concern, tolerance, readiness for reconciliation, and love, instead of any form of possessive lust or sexual misuse.

Only what has already been experienced in personal and familial relationships can be practised on the level of nations and religions.

IV. A transformation of consciousness

Historical experience demonstrates the following: Earth cannot be changed for the better unless we achieve a transformation in the consciousness of individuals and in public life. The possibilities for transformation have already been glimpsed in areas such as war and peace, economy, and ecology, where in recent decades fundamental changes have taken place. This transformation must also be achieved in the area of ethics and values ! Every individual has intrinsic dignity and inalienable rights, and each also has an inescapable responsibility for what she or he does and does not do. All our decisions and deeds, even our omissions and failures, have consequences.

Keeping this sense of responsibility alive, deepening it and passing it on to future generations, is the special task of religions. We are realistic about what have achieved in this consensus, and so we urge that the following be observed.

1. A universal consensus on **many disputed ethical questions** (from bio – and sexual ethics through mass media and scientific ethics to economic and political ethics) will be difficult to attain. Nevertheless, even for many controversial questions, suitable solutions should be attainable in the spirit of the fundamental principles we have jointly developed here.
2. In many areas of life a new consciousness of ethical responsibility has already arisen. Therefore we would be pleased if as many **professions** as possible, such as those of physicians, scientist, business people, journalists, and politicians would develop up-to-date **codes of ethics** which would provide specific guidelines for the vexing questions of these particular professions.
3. Above all, we urge the various **communities of faith** to formulate their **very specific ethic**: what does each faith tradition have to say, for example, about the meaning of life and death, the enduring of suffering and the forgiveness of guilt, about selfless sacrifice and the necessity of renunciation, about compassion and joy ? These will deepen, and make more specific, the already discernible global ethic.

In conclusion, we appeal to all the inhabitants of this planet. Earth cannot be changed for the better unless the consciousness of individual is changed. We pledge to work for such transformation in individual and collective consciousness, for the awakening of our spiritual powers, for a **conversion of the heart**. Together we can move mountains ! Without a willingness to take risks and a readiness to sacrifice there can be no fundamental change in our situation ! Therefore we commit ourselves to a common global ethic, to better mutual understanding, as well as to socially-beneficial, peace-fostering, and Earth-friendly ways of life.

We invite all men and women, whether religious or not, to do the same.*

* Kas Kung, (Ed.), *Yes to a Global Ethic* (London: SCM Perss, 1996), h. 8-26.

ISI PERJANJIAN POSO DI MALINO*

1. Menghentikan semua bentuk konflik dan perselisihan.
2. Menaati semua bentuk dan upaya penegakan hukum dan mendukung pemberian sanksi hukum bagi siapa saja yang melanggar.
3. Meminta aparat negara bertindak tegas dan adil untuk menjaga keamanan.
4. Untuk menjaga terciptanya suasana damai menolak memberlakukan keadaan darurat sipil serta campur tangan pihak asing.
5. Menghilangkan seluruh fitnah dan ketidakjujuran terhadap semua pihak dan menegakkan sikap saling menghormati dan memaafkan satu sama lain demi terciptanya kerukunan hidup bersama.
6. Tanah Poso adalah bagian integral dari Indonesia. Karena itu, setiap warga negara memiliki hak untuk hidup, datang dan tinggal secara damai dan menghormati adat istiadat setempat.
7. Semua hak-hak dan kepemilikan harus dikembalikan ke pemiliknya yang sah sebagaimana adanya sebelum konflik dan perselisihan berlangsung.
8. Mengembalikan seluruh pengungsi ke tempat asal masing-masing.
9. Bersama pemerintah melakukan reha-bilitasi sarana dan prasarana ekonomi secara menyeluruh.
10. Menjalankan syariat agama masing-masing dengan cara dan prinsip saling menghormati dan menaati segala aturan yang telah disetujui baik dalam bentuk UU maupun dalam peraturan pemerintah dan ketentuan lainnya

* *Kompas*, 20 Desember 2001 atau [http://www.kjritfm.de/Buletin Des 2001.doc](http://www.kjritfm.de/Buletin%20Des%202001.doc)

ISI PERJANJIAN MALUKU DI MALINO*

- 1) Mengakhiri semua bentuk konflik dan perselisihan.
- 2) Menegakkan supremasi hukum secara adil dan tidak memihak. Karena itu, aparat harus bertindak profesional dalam menjalankan tugasnya.
- 3) Menolak segala bentuk gerakan separatis termasuk Republik Maluku Selatan.
- 4) Sebagai bagian negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka bagi semua orang berhak untuk berada dan berusaha di wilayah Maluku dengan memperhatikan budaya setempat.
- 5) Segala bentuk organisasi, satuan kelompok atau laskar bersenjata tanpa izin di Maluku dilarang dan harus menyerahkan senjata atau dilucuti dan diambil tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku; Bagi pihak-pihak luar yang mengacaukan Maluku, wajib meninggalkan Maluku.
- 6) Untuk melaksanakan seluruh ketentuan hukum, maka perlu dibentuk tim investigasi independen nasional untuk mengusut tuntas peristiwa 19 Januari 1999, Fron Kedaulatan Maluku, Kristen RMS, Laskar Jihad, Laskar Kristus, dan pengalihan agama secara paksa.
- 7) Mengembalikan pengungsi secara bertahap ke tempat semula sebelum konflik.
- 8) Pemerintah akan membantu masyarakat merehabilitasi sarana ekonomi dan sarana umum seperti fasilitas pendidikan, kesehatan dan agama serta perumahan rakyat agar masa depan seluruh rakyat Maluku dapat maju kembali dan keluar dari kesulitan. Sejalan dengan itu, segala bentuk pembatasan ruang gerak penduduk dibuka sehingga kehidupan ekonomi dan sosial berjalan dengan baik.
- 9) Dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan seluruh wilayah dan masyarakat diharapkan adanya kekompakan dan ketegasan untuk TNI/Polri sesuai fungsi dan tugasnya. Sejalan dengan itu, segala fasilitas TNI segera dibangun kembali dan dikembalikan fungsinya.
- 10) Untuk menjaga hubungan dan harmonisasi seluruh masyarakat, pemeluk agama Islam dan Kristen maka segala upaya dan usaha dakwah harus tetap menjunjung tinggi undang-undang dan ketentuan lain tanpa pemaksaan.
- 11) Mendukung rehabilitasi khususnya Universitas Pattimura dengan prinsip untuk kemajuan bersama. Karena itu, rekrutmen dan kebijakan lainnya secara terbuka dengan prinsip keadilan dan tetap memenuhi syarat keadilan.

Perjanjian ini kami buat dengan tulus dengan tekad menjalankannya secara konsekwen. Bagi pihak-pihak yang melanggar dan tidak menjalankan perjanjian ini akan diproses secara hukum. Tindak lanjut perjanjian ini akan dijalankan dengan agenda serta rencana sebagai berikut: I. Komisi Keamanan dan Penegakan Hukum; II. Komisi Sosial Ekonomi.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Malino, 12 Februari 2000.

* *Kompas*, 13 Februari 2002, h. 11.

CURRICULUM VITAE

Nama : Lathifatul Izzah.

Tempat, Tgl. Lahir : Gresik, 14 Agustus 1978

Alamat asal : Jl. K.H. Wahid Hasim No. 67 Sumurber Panceng Gresik
Rt. XVII/VI Jawa Timur.

Alamat Yogyakarta : PP. Wahid Hasim Gaten Condong Catur Depok Sleman.

Pendidikan : 1. MI. Sumurber, lulus 1990
2. MTs. Sumurber, lulus 1993
3. MA. Sumurber, lulus 1996
4. Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, 1996

Nama orang tua:

Ayah : Moh. Muhtadi

Ibu : Ma'ani